

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Novel sebagai Karya Sastra

Novel pada karya sastra menawarkan kehidupan dunia yang kompleks. Hal ini, disebabkan novel memiliki rangkaian cerita seseorang dalam kehidupannya melalui penonjolan watak perilaku. Novel diciptakan secara imajinatif melalui berbagai unsur pembangun seperti alur, penokohan, latar dan sudut pandang. Semua ini diintegrasikan dengan kenyataan yang lengkap sehingga terlihat seolah-olah terjadi.

Menurut Nurgiyantoro (2013:13) novel memberikan sesuatu hal secara kompleks, rinci, detail dan melibatkan persoalan hidup yang utuh. Dalam novel, sastrawan merefleksi berbagai persoalan kemudian mengungkapkannya dalam bentuk fiksi menurut pandangannya. Sastra novel memiliki peranan penting dalam menyampaikan fenomena kehidupan dari berbagai permasalahan hidup manusia, masalah sosial, politik, budaya, agama, dan sebagainya. Adapun unsur pembangun sebagai kontruksi cerita yang berkaitan dengan sejarah dalam penelitian ini terfokus pada alur, tokoh dan latar.

a. Alur

Alur merupakan elemen fiksi sebagai unsur yang memaparkan perjalanan cerita yang menimbulkan sebab akibat. Menurut Nurgiyantoro (2013:169) alur termanifestasikan melalui tingkah laku, perbuatan, dan watak tokoh baik yang bersifat fisik, batin, baik verbal maupun nonverbal. Dalam hal ini, sebagai refleksi perjalanan tokoh cerita dalam menghadapi suatu permasalahan-permasalahan kehidupan.

Alur juga dapat dijadikan sebagai elemen fiksi jalan cerita yang memaparkan peristiwa demi peristiwa. Dalam hal ini, terhubung secara kasual, dan dapat menyebabkan terjadinya dampak bagi peristiwa yang lain (Stanton, 2012:26). Rangkaian peristiwa tersebut disusun secara kronologis dari sejak awal hingga akhir cerita yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.

b. Tokoh

Tokoh merupakan pelaku cerita dan juga dapat diartikan perwatakan. Tokoh dan perwatakannya merupakan suatu keutuhan yang padu. Setiap peran tokoh cerita pasti memiliki perwatakan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, seperti masalah penempatan tokoh cerita dan perwatakannya yang dilukiskan terhadap cerita yang memberikan penggambaran jelas terhadap pembaca.

Nurgiyantoro (2013:260) mengungkapkan bahwa tokoh dalam peranannya dibedakan pada tokoh utama dan tambahan. Tokoh utama menempati posisi strategis, yang banyak diceritakan dan sangat mempengaruhi alur cerita yang utuh. Di pihak lain, tokoh tambahan dalam kemunculannya cenderung diabaikan atau kurang mendapatkan perhatian. Tokoh memiliki posisi sentral yang membawakan amanat, moral, pesan, atau hal lain yang dihadirkan pada pembaca.

c. Latar

Latar diartikan sebagai sesuatu hal mengenai kapan dan di mana sebuah cerita itu berlangsung dan memiliki pengertian tempat, waktu, dan lingkungan sosial. Stanton (2012:35) mengemukakan bahwa latar merupakan lingkungan pada lingkup cerita yang berhubungan dan berinteraksi dengan peristiwa yang terjadi pada karya sastra. Latar dalam hal ini memberikan pijakan cerita yang

lengkap guna memberikan kesan realitas, sehingga pembaca difasilitasi guna memudahkan dalam menilai kebenaran dan ketepatan aktualisasi dalam cerita.

Latar dapat dilihat melalui dua jenis latar, yakni latar netral dan fungsional. Latar netral memberikan deskripsi sebuah sesuatu secara umum. Sementara itu, latar fungsional lebih menonjolkan ciri khas latar tertentu baik waktu, tempat maupun sosial budaya. Latar ini memiliki fungsi menonjol dalam kaitannya cerita secara keseluruhan yang memengaruhi bahkan menentukan perkembangan alur. Bahkan latar fungsional, tidak dapat diganti dengan latar lain tanpa mengganggu atau merusak cerita (Nurgiyantoro, 2013:307).

Berdasarkan uraian di atas, novel merupakan sebuah sastra tulis yang memberikan sajian lengkap dengan berbagai persoalan kehidupan yang utuh. Adapun unsur pembangun dalam kajian sejarah dalam sastra ini meliputi unsur alur, tokoh dan latar. Alur sebagai urutan peristiwa yang mensyaratkan adanya sekelompok peristiwa. Sementara itu, tokoh sebagai pelaku cerita yang memiliki peran sentral dalam menyampaikan berbagai hal kepada pembaca. Terakhir, yakni latar sebagai pijakan cerita yang lengkap dan jelas.

2.2 Hubungan Sastra dengan Sejarah

Karya sastra yang diciptakan pengarang, tidak lepas dari pengalaman-pengalaman dan peristiwa masa lalu untuk dijadikan karya sastra. Hal ini membuat hubungan antara karya sastra dengan peristiwa sejarah memiliki hubungan yang saling berkaitan. Hal ini didukung melalui pendapat Semi (1989:43) menyatakan bahwa sastra dapat dimengerti sebagai prinsip perpaduan imajinasi dengan kenyataan atau relitas di masyarakat. Karya sastra diciptakan

atas dasar fenomena realitas dalam sekitar diri pengarang, dan menampilkannya ke dalam sebuah karangan fiksi sebagai representasi kehidupan nyata.

Sementara itu, hakikat sejarah menurut Kuntowijoyo (2013:14) adalah rekontruksi masa lalu, dari apa saja yang dipikirkan, diucapkan, dikerjakan, dirasakan, dan yang dialami oleh seseorang asalkan memenuhi persyaratan menjadi sejarah. Rekonstruksi karya sastra dengan sejarah memiliki sebuah perbedaan. Dalam hal ini, perbedaannya bahwa sejarah menekankan pada suatu hal yang harus benar kenyataannya, sedangkan karya sastra masih memberikan toleransi kepada hal yang mungkin tidak terjadi (Kartodirdjo, 1993:93). Karya sastra dalam hal ini telah memadukan cerita sejarah dengan gaya bercerita pengarang yang menarik dari suatu zaman sehingga lebih terlihat dan terasa kuat.

Sejalan dengan hal tersebut Mahayana (2005:361) menjelaskan bahwa karya sastra itu lebih banyak merepresentasikan fakta sejarah, bahkan tidak sedikit pula masyarakat yang menganggapnya sebagai karya sejarah. Kenyataan yang ditulis pengarang merupakan realitas masa silam hingga kini yang melahirkan karya sastra sejarah. Baik sastra maupun sejarah memiliki kesamaan dalam hal rekontruksi masa lalu sebagai karya yang merekam sebuah peristiwa.

Fakta terkait fenomena sejarah dalam karya sastra dijadikan pengarang ke dalam karya kreatifnya. Terlebih lagi, pengarang untuk menyampaikan catatan kritisnya dalam mengungkapkan peristiwa yang mungkin terluput dari catatan sejarah. Berbagai macam argumen tentang makna teks sastra sering kali mudah diuraikan dengan melihat sejarah. Sejarah sebagai alat analisa yang kuat, karena memberikan dasar yang kokoh untuk menancapkan pernyataan yang berkenaan dengan makna (Ryan, 2007:217). Kemudahan menguraikan teks sastra dengan

sejarah tidak terlepas dari realitas antara sejarah dengan karya sastra pada masa lampau yang saling berkaitan.

Teks sejarah dengan karya sastra memiliki kesamaan yakni sebagai rekontruksi masa lalu yang merekam berbagai peristiwa. Keduanya dijadikan sebuah dokumen atau catatan tentang apapun yang berkaitan dengan masa lalu. Perbedaan di sini bahwa sejarah dituntut untuk menggambarkan realitas yang pernah ada. Sedangkan, karya sastra memungkinkan tidak menggambarkan realitas yang ada. Namun perlu digarisbawahi, bahwa terdapat banyak karya sastra merepresentasikan fakta sejarah atau peristiwa-peristiwa faktual ke dalam sebuah karya sastra.

2.3 Kritik Sejarah Baru dalam Karya Sastra

Kritik sejarah baru menjadi suatu pendekatan yang tepat dalam penelitian ini. Hal ini, tidak lepas dari kinerja pendekatan ini, yang menjajarkan antara teks sastra dengan sejarah pada suatu zaman. Dalam hal ini, berguna mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang tertinggal pada masa lalu mengenai peristiwa sejarah melalui karya sastra dengan pendekatan kritik sejarah baru. Pendekatan ini mula-mula diperkenalkan oleh Stephen Greenblatt pada tahun 1982. Kritik sejarah baru menekankan hal baru dalam mengkaji hubungan sejarah dengan karya sastra.

Menurut Sugiarti (2009:165) bahwa kritik sejarah baru menitikberatkan kaitan karya sastra terhadap berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial yang menyertainya. Pada sebuah spektrum kehidupan manusia hal ini disebut sebagai kebudayaan, di mana sastra menduduki tempat yang penting. Secara umum

kebudayaan berkaitan dengan kepercayaan, kebiasaan, moral, seni maupun hukum yang merujuk pada ragam kemampuan dan kebiasaan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut Budianta (dalam Sahliyah, 2017:113) mengungkapkan bahwa budaya menjadi konsep dalam *new historicism* atau kritik sejarah baru. Unsur budaya pada teks sastra tidak hanya menjadi pelengkap, namun memiliki tendensi yang menarik. Hal tersebut, karena karya sastra ikut membangun, serta mereproduksi budaya melalui imajinasi kreatifnya. Selain itu, kritik sejarah baru dalam hal ini telah mendorong munculnya kesadaran dekonstruktif pada hal yang selama ini tidak memperoleh perhatian.

Fokus kritik sejarah baru kepada karya sastranya sendiri menurut pemikiran Sugiarti (2015:232) memperhatikan dua hal penting antara konteks dan teks. Teks muncul pada teks sastra karena dipengaruhi oleh konteks. Hal tersebut, menunjukkan bahwa berbagai persoalan sosial pada teks muncul akibat konteks yang dihadirkan pengarang dalam merefleksi kehidupan.

Sementara itu, kritik sejarah baru pada teks sejarahnya menurut Barry (2010:202) yakni dengan meletakkan teks karya sastra pada kerangka teks nonsastra. Dokumen teks nonsastra tidak dilihat pada konteks namun dilihat sebagai suatu koteks. Dalam hal ini sebagai suatu wacana yang memiliki keterkaitan dengan karya sastra yang hadir mendahului ataupun dibelakang yakni mengiringi suatu wacana.

Selden (2005:184) mengungkapkan bahwa kritik sejarah baru menempatkan “*re-situating text in the complex discursive frame of their originating period by way of detailed allusive reading of them in their intertextual relations with other contemporary political, cultural and popular discourses takes this new*

historicism.” Melalui pemaparan kritik sejarah baru tersebut, memiliki arti “Menempatkan kembali teks dalam kerangka diskursif kompleks periode asal mereka dengan cara pengarahannya yang mengganggu dari mereka dalam hubungan intertekstual mereka dengan wacana politik, budaya dan populer lainnya membawa historisisme baru ini.”

Secara pelaksanaannya, Barry (2010:206) mengungkapkan bahwa kritik sejarah baru merupakan pendekatan yang melibatkan pembacaan detail yang intensif dalam kerangka kritis literer terhadap teks-teks nonsastra. Dokumen jarang ditawarkan seluruhnya, namun kutipan yang ditelaah secara intensif. Kontekstualisasi dokumen biasanya minimal, karena ia merupakan siasat penulis untuk meningkatkan dampak dokumen tersebut.

Kritik sejarah baru tidak berharap metodenya dijunjung tinggi dan dihormati sejarawan. Namun, sebaliknya bahwa ini merupakan cara mengerjakan sejarah yang sangat menarik dan dinikmati oleh nonsejarawan. Melalui pemaparan di atas dapat diungkapkan bahwa kritik sejarah baru menawarkan pembaharuan menitik tekankan kaitan sastra terhadap berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, politik yang menyertainya. Keberadaan teks sastra dan sejarah memiliki hubungan intertekstualitas baik yang hadir secara mendahului ataupun mengiringi.

2.4 Sejarah dalam Karya Sastra

Sejarah sebagai cabang ilmu pengetahuan selalu mempelajari, berusaha menangkap makna dan menyusun kisah kejadian manusia secara teliti. Berbagai peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan sejarah, tidak dapat dituliskan secara

lengkap, ada hal-hal lain yang mungkin luput dari pengamatan. Hal ini, seperti yang dikemukakan oleh Ali (2005:16) bahwa sejarah tidak dapat dan memang tidak mungkin dapat, melukiskan sejarah serba objek secara keseluruhan. Oleh sebab itu, dapat ditentukan dengan pasti bahwa sumber sejarah hanya mengandung sebagian kecil dari sejarah.

Bagian dari sejarah yang terselip salah satunya dapat ditemukan dari teks sastra. Hal ini, didukung oleh pendapat Sugihastuti (2011:160) mengungkapkan bahwa sastra apabila dipandang pada segi informasinya termasuk sebagai sumber sejarah. Sastra merupakan karya naratif mengenai uraian lengkap berkaitan dengan peristiwa masa lampau yang tertulis menyangkut masalah sosial, politik, kultural, ekonomi, ideologi ataupun agama. Dalam hal ini, pengarang mencoba menerjemahkan berbagai realitas yang hadir pada kehidupan sekelilingnya.

Realitas sejarah menjadi bahan pengarang yang diproses melalui prosedur tertentu seperti pemahaman, interpretasi atau evaluator dari kejadian masa lampau ke dalam sebuah karya sastra. Realitas sejarah dalam hal ini tidak dipertanggungjawabkan dahulu, karena hanya untuk mengambil berbagai khazanah dari berbagai persoalan pada masa silam (Kuntowijoyo, 1987:130). Realitas sejarah menjadi hal menarik dalam karya sastra karena akan membangkitkan minat pembaca dalam menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya sejarah bagi kehidupan manusia.

Adapun realitas sejarah hadir pada novel menurut Georg Lukacs (dalam Kuntowijoyo, 1987:133) bahwa di dalamnya terdapat: 1) Keaslian sejarah yakni sebagai suatu yang berkaitan dengan ciri khas suatu zaman. Seperti moralitas, kehidupan batin, rela berkorban, heroisme, dan lain sebagainya. 2) Kesetiaan

sejarah yakni berkaitan bagaimana keharusan sejarah yang dilandaskan pada persoalan ekonomi, politik, sosial, budaya yang sebenarnya. 3) Keadaan tempat, yakni berkaitan terhadap suatu pendeskripsian bagaimana keadaan fisik, peralatan, tata cara dan sebagainya guna membantu memudahkan penghayatan sejarah.

Sementara itu, Carl G. Gustavson (dalam Kuntowijoyo, 2013:100) mengutarakan enam bentuk kekuatan penentu sejarah yang meliputi militer, agama, ekonomi, teknologi, institusi, dan ideologi. Selanjutnya, Kuntowijoyo menambahkan adanya: individu, seks, umur, golongan, etnis dan ras, mitos, serta budaya sebagai kekuatan penggerak terwujudnya sejarah. Secara keseluruhan, bentuk sejarah tersebut mencakup tiga belas aspek, namun difokuskan pada kontribusi yang penting dalam mengontruksi novel *Maya*. Kekuatan mengenai bentuk sejarah Orde baru tersebut menjadi amat penting sebagai refleksi sejarah Orde Baru yang meliputi: 1) institusi; 2) militer; 3) individu; dan 4) golongan.

2.4.1 Institusi

Durkhiem dalam Duverger (2000:398) mengungkapkan bahwa institusi merupakan ide-ide keyakinan, adat istiadat, dan praktik sosial yang oleh para individu ditemukan sudah dibangun dalam suatu masyarakat. Institusi dijadikan sebagai jumlah dari keseluruhan tindakan atau ide yang dilembagakan. Dalam hal ini, menyangkut adanya hubungan dan tata kelakuan yang terpusat dari aktivitas anggota pada institusi. Aktivitas dalam kegiatan institusi ini ditunjukan pada kelestarian dan ketahanan yang secara kesinambungan.

Kegiatan dalam institusi berlandaskan format yang stabil dan terstruktur. Selain itu, berisi seperangkat keyakinan dan ide-ide yang terbentuk secara tetap

dan tersusun terhadap pola kelakuan dan peranan anggota guna mencapai tujuan. Setiap institusi berhubungan sampai tingkatan tertentu seperti, sistem nilai, konsep tentang baik dan jelek, hingga benar dan salah, termasuk di dalamnya setuju maupun tidak setuju. Institusi secara khusus sebagai wadah terhadap suatu kelompok manusia dalam merencanakan strategi. Hal ini melalui suatu lembaga yang disertai struktur kepengurusan dan nama atau simbol (Duverger, 2000:100). Klasifikasi institusi sendiri dalam penelitian ini berdasarkan pada 2 jenis institusi, yakni *institution by design* (normatif) dan *institution by pure fact* (deterministik).

a. Institusi Normatif

Maran (2001:51) mengungkapkan bahwa institusi *by design* atau dikenal normatif ini merupakan lembaga yang tidak dengan paksaan fisik untuk menyesuaikan diri dengannya. Namun, pelanggaran yang dilakukan dari ketentuan akan dikenakan sanksi. Selain itu, batasan antara hukum, moral dan kebiasaan sosial ditentukan oleh nilai. Hukum, berkaitan dengan keterkaitan ketertiban masyarakat, kebaikan-kebaikan umum, keadilan, hingga kepentingan umum. Sementara itu, moral berkaitan dengan adanya buruk atau baiknya suatu hal dan sosial berkaitan mengenai tindakan yang diperbuat ataupun tidak diperbuat.

Duverger (2000:105) menambahkan bahwa *institution by design* atau normatif sebagai lembaga yang dibentuk dengan sengaja. Institusi ini dibentuk berdasarkan norma-norma dan diakui secara hukum. Kemudian, memiliki fungsi sebagai (*rule of law*) dalam mengatur perilaku yang harus dipatuhi oleh anggotanya di dalam tingkah lakunya. Institusi normatif atau *institution by design* merupakan lembaga yang berfungsi menurut undang-undang, dimana peraturan

harus dipatuhi oleh para anggotanya, terkait kewajiban legal, moral dan sosial tertentu.

Institusi dalam sebuah contoh, sejarah Indonesia menurut Kuntowijoyo (2013:103) bahwa dalam pergerakan nasional, berdiri partai-partai politik guna memudahkan penyebaran, pengorganisasian, dan pencapaian cita-cita. Mulanya didirikan PPPKI (Penghimpunan Pemufakatan-pemufakatan Politik Indonesia) pada akhir 1927 oleh seluruh kekuatan yang ada. Pada tahun 1939 dibentuklah GAPI (Gabungan Politik Indonesia) oleh semua kekuatan politik (kecuali PNI baru). Hasil politik yang terpenting ialah pernyataan persatuan pada 1928 yang dikenal dengan “Sumpah Pemuda.”

b. Institusi Deterministik

Institusi deterministik menurut Maran (2001:51) mengungkapkan bahwa institusi yang terjadi secara otomatis. Dalam hal ini, dikarenakan terjadinya proses yang tidak disengaja karena terjadinya peristiwa dalam masyarakat berkaitan dengan adanya permainan kekuatan. Hal tersebut, meliputi terjadinya kelas-kelas sosial, cara hidup, dan tingkatan pendapatan yang tanpa disadari bahwa semua itu dapat terjadi. Institusi merupakan suatu hal mencakup perilaku dalam meraih tujuan yang disepakati seputar kegiatan di masyarakat.

Menurut Duverger (2000:105) institusi deterministik yakni suatu institusi yang mengalami kekuasaan dan pengaruhnya secara otomatis. Dalam hal ini, sesuatu yang mungkin untuk tidak menyesuaikan dengan aturan. Tidak ada orang yang dipaksa secara fisik untuk menyesuaikan diri, hanya wajib membuatnya. Dengan kata lain, diikat oleh kewajiban legal, moral atau sosial tertentu yang

tidak bisa dihindari tanpa harus mendapatkan hukuman ataupun sanksi. Ketaatan kepada institusi ini karena sukarela serta ketaatan yang penuh kesadaran.

Secara umum, melalui pemaparan di atas dapat diuraikan bahwa institusi merupakan tempat bagi sekumpulan orang dalam meraih tujuan dengan strategi yang dilembagakan. Klasifikasi dalam institusi sendiri terbagi menjadi institusi normatif dan deterministik. Normatif yang berdasarkan norma-norma dan diakui secara hukum dan deterministik yakni sebuah institusi yang mengalami kekuasaan dan pengaruhnya secara otomatis.

2.4.2 **Militer**

Secara umum militer sebagai orang yang bersenjata, terlatih dan dipersiapkan untuk menghadapi musuh. Militer juga dipersiapkan untuk bertempur guna menjaga keamanan dari sebuah negara. Secara khusus, pengertian militer menurut Duverger (2000:257) merupakan alat politik kelas-kelas yang memiliki hak istimewa dan sebagai kelompok minoritas yang membutuhkan senjata, senapan mesin, dan tank. Kesemua ini digunakan untuk mempertahankan dominasinya terhadap kelas-kelas yang mengancam untuk menenggelamkannya secara paksa.

Militer memiliki ciri-ciri tersendiri, mereka mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, dan memiliki disiplin yang tinggi, serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata (Faisal, 2006:13). Fokus kajian sejarah Orde Baru dalam hal ini melihat dari sisi yang berbeda, yakni intervensi yang dilakukan oleh militer. Intervensi merupakan tindakan campur

tangan yang dilakukan oleh suatu lembaga terhadap permasalahan pertikaian diantara dua pihak. Dalam tindakan ini, akan menguntungkan satu pihak dan akan merugikan pihak lain dari yang bertikai.

Taufik Abdullah (dalam Haramain, 2004:21) mendefinisikan intervensi sebagai suatu hal yang memasuki ranah yang sebenarnya bukan haknya. Dalam hal ini, adanya militer terkait dengan suatu penilaian normatif akan tidak sahnya suatu hal yang terjadi. Secara khusus sebagai keterlibatan langsung dari perwira militer dalam kancah sosial ataupun politik. Intervensi militer dapat dilihat melalui hubungan sipil-militer sejauhmana pemimpin-pemimpin sipil mau mengatasi dan mengantisipasi intervensi militer ke dalam sosial dan politik.

Mehden (1987:140) mengungkapkan bahwa masuknya militer ke dalam masyarakat biasanya dikaitkan dengan perubahan penting di bidang, politik, ekonomi dan sosial. Pada dasarnya aktivitas militer itu merupakan suatu tindakan balasan terhadap ketegangan yang berkaitan dengan perkembangan. Berkaitan dengan intervensi yang dilakukan militer, terdapat adanya intervensi dalam kondisi sosial maupun politik.

a. Intervensi Kondisi Sosial

Intervensi kondisi sosial, yakni dikarenakan adanya permasalahan sebuah negara dengan kondisi sosial yang lemah, sehingga memunculkan berbagai kepentingan pada kelompok akan menyebar dengan cepat dan tinggi. Kemudian, struktur yang lemah dalam sebuah negara, akan membuat institusi politik tidak dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal dalam kontrol sosial. Hal ini disebabkan adanya komunikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya membuat militer berpeluang melakukan intervensi (Haramain, 2004:21).

Intervensi militer terhadap kondisi sosial sendiri berkaitan dengan hubungan masyarakat terhadap pemerintah atau pemerintah terhadap masyarakat. Apabila kondisi sosial mengalami masalah, maka militer berpeluang melakukan intervensi terhadap kondisi sosial.

Situasi atau kondisi sosial dalam hal ini, terbagi menjadi tiga dimensi, seperti yang dikemukakan oleh James Bossand (dalam Achlis, 1984:8-9) yakni memiliki struktur, kultur dan proses. 1) Struktur berkaitan sekelompok orang yang memiliki karakter, standar. Dalam hal ini, berkaitan pada sistem peranan serta pola-pola kekuasaan dan pengambilan keputusan, afeksi dan dukungan serta komunikasi dan pembagian tugas. 2) Kultur sebagai suatu norma untuk bertingkah laku dan bergaul di masyarakat. Dalam hal ini, berkaitan perasaan setempat yang menempati tempat bersama, senasip maupun kesadaran akan tertib moral, serta identitas kelompok. 3) Proses sebagai situasi yang menunjuk pada tingkat keberfungsian situasi tersebut. Melalui operasi-operasi dan mekanisme pemberian imbalan, hukuman atau sanksi-sanksi serta mekanisme resiprokal maka kegiatan individual maupun kolektif menjadi teratur, berirama seperti terprogram.

b. Intervensi Kondisi Politik

Intervensi militer kedua yakni terhadap kondisi politik, menurut Sundhaussen (dalam Britton, 1999:13) bahwa setidaknya terdapat dua faktor yang menyebabkan keterlibatan ABRI dalam arena politik, yaitu kegagalan sistem dan ada kepentingan golongan dalam tubuh militer. Kegagalan sistem berkaitan dengan ketidakmampuan untuk menentukan, atau menuntut hak pengangkatan perwira dan organisasi militer yang terikat oleh kesetiaan. Sementara itu, kepentingan golongan diartikan sebagai keinginan militer mempertahankan suatu

otonomi tertentu atas apa yang mereka anggap sebagai soal-soal intern militer. Hal ini, sekaligus bertujuan melindungi fungsi militer terhadap campur tangan kekuatan dan lembaga sipil lainnya.

Menurut Haramain (2004:21) menambahkan bahwa intervensi militer terhadap kondisi politik muncul karena adanya persoalan-persoalan sipil yang kembali kepada militer untuk meminta dukungan dan adanya peraturan atau konstitusi negara yang lumpuh. Selain itu, adanya krisis karena kekacauan ekonomi yang dapat melumpuhkan institusi politik. Oleh karena itu, pihak militer mungkin mengadakan kudeta untuk menjalankan apa yang menurut pendapatnya sebagai pemulihan politik yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan (Mehden, 1987:142).

Kekuatan militer dalam sejarah begitu besar dalam merekonstruksi sejarah pada peristiwa masa lampau. Hal ini, sesuai dengan contoh yang disampaikan Kuntowijoyo (2013:106) seperti peran yang diambil tentara Indonesia dalam peristiwa proklamasi. Pada saat itu, militer bergeriliya berhasil mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia pada waktu terdesak, dengan menyakinkan PBB. Dalam hal ini, telah membuktikan dan mempertegas besarnya pengaruh militer pada peranannya merekonstruksi sejarah.

Militer dapat dikemukakan sebagai salah satu tonggak menentukan suatu sejarah yang pernah dilakukan pada masa lalu. Militer merupakan alat politik kelas yang memiliki hak istimewa sebagai kelompok minoritas yang membutuhkan senjata untuk mempertahankan dominasinya terhadap kelas-kelas yang mengancam. Militer memiliki karakteristik organisasi teratur, pakaiannya

seragam, disiplinnya tinggi. Adapun, dalam kajian sejarahnya militer tidak lepas dari namanya intervensi pada kondisi sosial maupun kondisi politik.

2.4.3 Individu

Individu dalam bahasa Prancis memiliki arti “orang seseorang” atau mengacu pada satu orang manusia. Melalui paham ilmu sosial, Soelaeman (2009:113) memaparkan bahwa individu dinyatakan sebagai suatu orang yang berkaitan paling terbatas. Individu ini menyangkut tabiat jiwanya yang majemuk dalam memegang peranan penting di masyarakat. Setiap individu memiliki ciri khas yang telah dibangun di dalam dirinya dalam menyesuaikan kehidupan dengan perubahannya. Terlepas dari itu, individu memiliki peranan penting dalam realitas di masa lampau dalam merekonstruksi sejarah. Individu tersebut yang paling menonjol dalam lingkungannya serta memiliki intelektual yang mumpuni.

Kartodirdjo (1993:45) mengungkapkan bahwa peran individu dalam tokoh politik terkait kekuatan sejarah memiliki peranan yang besar, bahkan sering menjurus kepada pendapat seolah-olah sejarah dibuat oleh tokoh atau orang besar dalam sejarah. Hal ini, didukung oleh pendapat Surbakti (1992:135) yang mengungkapkan bahwa guna memahami sejarah hanya perlu mengkaji kehidupan individu yang tergolong besar karena relatif mudah untuk melakukan interpretasi atas peristiwa-peristiwa sejarah melalui tindakan beberapa pemimpin.

Sejarah memang selalu memunculkan sosok orang kuat yang lahir dari suatu massa dari suatu kondisi sosial politik. Dalam hal ini, muncul untuk memberikan psikologis bagi masyarakat yang biasanya dirundung masalah dan krisis. Budiardjo (1978:34) mengungkapkan bahwa setiap individu manusia

merupakan subjek kekuasaan sekaligus sebagai objek dari kekuasaan. Peranan tokoh politik dalam sejarah, tidak terlepas dari kekuasaan sebagai pemimpin dari suatu kelompok masyarakat. Konsep kepemimpinan dan kekuasaan mempunyai hubungan yang erat, karena dengan kekuasaan seseorang dapat menciptakan sebuah sejarah pada masa silam melalui tindakan-tindakannya.

Kekuasaan menurut Budiardjo (1991:33) dapat dicakup dengan menggunakan suatu konsep yang bersifat *behavioristis*, yaitu “keputusan” (*descision*). Konsentrasi kekuasaan berarti pengambilan keputusan yang sentralistik, di mana keputusan-keputusan diambil oleh mereka yang berkuasa dalam pengambilan keputusan. Kekuasaan politik melahirkan keputusan-keputusan yang wujudnya secara formal adalah paling otoritatif diantara nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Guna memahami gejala kekuasaan dalam tokoh politik secara tuntas. Maka kekuasaan memiliki 6 dimensi, yakni konsensus dan paksaan, langsung dan tidak langsung, implisit dan eksplisit, potensial dan aktual, positif negatif, jabatan dan pribadi (Surbakti, 1992:59). Adapun pengklasifikasian bentuk dimensi kekuasaan, lebih dikategorikan sesuai dengan data dalam novel. Dalam hal ini, kekuatan penentu arah sejarah dari individu politik melalui kekuasaan yakni sebagai berikut.

a. Positif dan Negatif

Tujuan individu tokoh politik pada kekuasaan positif dan negatif, merupakan tujuan penguasa yang menggunakan kekuasaannya untuk memutuskan atau mendapatkan ketaatan dari pihak yang dipengaruhi. Surbakti (1992:61) mengungkapkan bahwa dimensi kekuasaan tokoh politik berupa positif

merupakan penggunaan sumber kekuatan yang dimilikinya dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan dan bersifat penting.

Sebuah contoh ketika seorang presiden dalam memengaruhi atau memutuskan bawahannya pada sebuah kebaikan yang harus dilakukan dalam memajukan sebuah negara. Hal tersebut sebagai dimensi akan kekuasaan positif. Individu tokoh politik pada kekuasaan positif memiliki definisi suatu anugerah yang diberikan Tuhan kepada penguasa dalam melakukan tindakannya.

Sementara itu, dimensi kekuasaan negatif menurut Sitepu (2012:54) merupakan suatu hal bagaimana individu tokoh politik menggunakan kekuasaannya dalam mencegah orang lain. Hal ini, karena dianggap merugikan dan dianggap tidaklah perlu. Dimensi negatif juga berkaitan pada nuansa egois, arogan dalam menentukan tindakan yang dilakukan. Guna mencapai tujuannya, pemegang kuasa tersebut melakukan tindakan yang bernuansa tekanan atau paksaan (Lai, 2013).

b. Jabatan dan Pribadi

Dimensi kekuasaan mengenai jabatan dan pribadi menurut Surbakti (1992:63) bahwa kekuasaan berkaitan dengan jabatan yang dimiliki oleh individu berhubungan erat dengan jabatan. Dalam hal ini, berkaitan dengan kehadiran wewenang, tugas, hak dan tanggung jawab individu. Kekuasaan dalam jabatan seperti kedudukan menteri, jenderal, presiden dan sebagainya.

Sementara itu menurut Sitepu (2012:54) kekuasaan utama yang hadir bersumber pada kualitas pribadi dalam kaitan berupa penampilan, kharisma, asal-usul, keluarga, ataupun wahyu. Kualitas pribadi dengan jabatan bagi masyarakat mapan dan maju merupakan suatu sumber kekuasaan yang sama. Namun bagi

masyarakat sederhana kualitas pribadi lebih menonjol jika dibandingkan dengan kekuasaan jabatan.

Surbakti (1992:72) memberikan sebuah contoh saat pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, kekuasaan Presiden Sukarno. Pada saat itu, kekuasaan individu tokoh politik bukan dalam jabatan sebagai presiden. Namun terletak akan kualitas pribadi yang berkharismatik dalam memunculkan ketaatan bagi masyarakat.

Berdasarkan berbagai pendapat melalui pemaparan di atas dapat diuraikan bahwa individu dalam hal ini terfokus pada individu dari segi peranan tokoh politik dalam sejarah yang tergolong besar. Individu tersebut memiliki kemampuan untuk mengubah sejarah yang memiliki kemampuan di atas kebanyakan orang. Selain itu, mereka yang paling menonjol dalam lingkungannya serta memiliki intelektual yang mumpuni. Adapun sisi yang dilihat dalam hal ini meliputi kekuasaan dalam tokoh politik yang meliputi positif dan negatif serta jabatan dan kualitas pribadi.

2.4.4 Golongan

Golongan merupakan sekumpulan orang yang meliputi waktu lama serta timbulnya hubungan timbal balik di antara anggotanya. Penjelasan secara khusus mengenai golongan sendiri menurut Park dan Burgess (dalam Shadily, 1984:255) mengungkapkan bahwa golongan mau tidak mau harus terbawa atau dipimpin oleh sesuatu tujuan bersama dan karena itu ia mampu untuk bertindak sebagai suatu golongan.

Setiap anggota golongan mempunyai cita-cita dan angan-angan terhadap suatu tujuan yang hendak dicapai menurut persamaan masing-masing. Kesatuan pendapat yang sama dari sebagian besar anggota mengenai angan-angan terhadap golongan merupakan jiwa golongan yang sering terwujud sebagai cita-cita atau citra dari suatu golongan (Shadily, 1984:258).

Melalui adanya cita-cita serta ikatan psikologi inilah yang membuat terjadinya peleburan individu-individu untuk membentuk dalam suatu golongan. Terlebih lagi, dengan adanya wujud cita-cita dari suatu golongan tersebut. Secara tidak langsung akan membuat perasaan golongan-golongan ini akan mendatangkan perasaan bangga, bahwa tidak ada yang lebih baik dari golongannya sendiri. Sementara itu, pembagian golongan sendiri menurut Cooley (dalam Shadily, 1984:239) terbagi menjadi dua, yakni *primary group* atau golongan primer dan *secondary group* atau golongan sekunder.

a. Golongan Primer

Golongan primer merupakan kelompok dengan nuansa ikatan yang erat dari para anggotanya dan seringkali berkomunikasi secara langsung. Suyanto (2010:25) mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai kondisi fisik golongan primer yakni para anggotanya yang saling berdekatan secara fisik. Golongan primer relatif dengan jumlah relatif sedikit untuk memungkinkan masing-masing anggota dapat bertemu secara langsung.

Anggota golongan primer memiliki hubungan bersifat permanen karena keseimbangan tujuan yang dimiliki. Selain itu, memiliki sikap dan tujuan yang sejalan dalam tindakannya untuk meraih tujuan. Charles Horton Cooley (dalam

Haviz, 2017) mengungkapkan bahwa golongan primer merupakan suatu golongan dengan anggota yang berdasarkan ikatan daerah, tempat tinggal ataupun budaya.

Guna memperjelas dalam mendapatkan bagaimana perbedaan mengenai golongan primer dengan sekunder. Kingsley Davis (dalam Suyanto, 2010: 28) mengungkapkan bahwa sifat-sifat sosial dalam golongan primer yakni memiliki tujuan yang sejalan. Golongan primer terikat pada hubungan yang murni dan pengawasan dari anggota yang mengarah pada hubungan nonformal.

b. Golongan Sekunder

Golongan sekunder merupakan golongan yang berlawanan dengan kelompok primer. Golongan ini, sebagai kebalikan dalam mengenai kondisi fisik maupun sifat-sifatnya dengan kelompok primer. Suyanto (2010:25) memberikan gambaran jelas mengenai kondisi fisik dan sifat golongan sekunder yakni jumlah anggotanya relatif banyak. Hubungan golongan sekunder tidak erat dan mengalami kerenggangan karena tidak kenal secara langsung melalui pribadi anggota lainnya, sehingga bernuansa tidak permanen akibat ketidakseimbangan tujuan.

Golongan sekunder mengarah pada skala besar yang terdiri dari banyak orang. Hubungannya sendiri dilandaskan atas keuntungan bersama. Golongan sekunder juga cenderung pada hal formal (resmi), impersonal (tidak bersifat pribadi), serta dilandaskan pada keuntungan golongan itu semata. Selain itu, hubungan golongan sekunder berfungsi guna mencapai sebuah tujuan tertentu, agar golongan ini lebih memiliki peran sebagai sarana bukan hanya tujuan (Haviz, 2017).

Hubungan golongan sekunder mengarah hal formal, akibat minimnya bertemu antara anggotanya. Mereka baru bertemu ketika adanya tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini, jelas bahwa golongan sekunder terdiri dari banyaknya orang, di mana hubungannya tidak bersifat permanen serta berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langgeng. Golongan sekunder memiliki sifat sosial ketidaksamaan sikap dan harapan dalam mencapai sebuah tujuan. Selain itu, terdapat penilaian yang tidak penting dari anggota yang lain, sekaligus memiliki hubungan yang bernuansa formal (Suyanto, 2010:28).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diuraikan bahwa golongan merupakan sekumpulan orang yang memiliki hubungan timbal balik diantara anggotanya. Golongan terbagi menjadi golongan primer dan golongan sekunder. Golongan primer merupakan golongan sosial yang paling sederhana, dikarenakan anggotanya memiliki hubungan bersama yang sangat erat. Sementara itu, golongan sekunder merupakan golongan yang jumlah orangnya relatif banyak dan belum tentunya mengenal satu sama lain sehingga sifatnya tidaklah langgeng.

2.5 Fungsi Sejarah dalam Karya Sastra

Fungsi sejarah secara umum, sebagai sumber pengetahuan serta sebagai media untuk mengetahui peristiwa-peristiwa penting pada masa lampau dengan berbagai permasalahannya. Meskipun sejarah memiliki manfaat dari pengalaman masa lalu, namun banyak kalangan masyarakat memandang sebelah mata sejarah. Sejarah bukanlah sekedar cerita masa lalu yang sekedar lewat. Namun melalui pemahaman sejarah dari berbagai peristiwa, dan pengenalan terhadap sifat

manusia, memberikan pelajaran seseorang dalam sebuah konsep untuk menjalani hidup di masa depan yang lebih baik.

Sejarah sebagai gambaran peristiwa masa lalu, memang selalu memberikan berbagai peristiwa yang dijadikan sebagai pelajaran melalui pengalaman-pengalaman dari diri seseorang maupun dari orang lain. Hal ini, didukung seperti yang dikemukakan oleh Rowse (2015:26) satu hal yang dapat dipelajari dari sejarah adalah bahwa tidak seorang pun pernah mempelajari sesuatu dari sejarah. Namun, mereka mendapatkan hal banyak, karena sejarah menawarkan bekal pengalaman yang tidak ada habisnya terhadap apa yang mereka mungkin dapatkan.

Selain adanya pengetahuan dan pelajaran yang bisa dipetik dalam sejarah untuk lebih baik di masa mendatang. Cicero (dalam Supardan, 2015:309) menyatakan bahwa sejarah memiliki fungsi sebagai didaktik, serta beberapa adagium yang menjelaskan bahwa sejarah merupakan guru dalam berkehidupan, terkait kebenaran, dan saksi waktu masa silam. Mengingat fungsinya yang penting, sejarah dalam hal ini menjadi pengingat kolektif umat manusia dan dapat dijadikan wahana pertama untuk pembelajaran masa lalu kepada generasi muda.

Sementara itu, sejarah dalam segi manfaatnya, Ketinge (dalam Rowse, 2015:154) mengemukakan bahwa sejarah dihargai sebagai ilmu yang memberikan pengenalan terhadap sifat manusia. Apabila diselidiki dari sisi geografis, sejarah merupakan presentasi komperhensif karakter yang hidup dalam setiap situasi yang dapat dibayangkan. Sejarah memperluas pengetahuan, menyediakan material untuk melakukan analisis kesalahan, mengolah pembatasan terhadap kekaguman

yang menyenangkan. Sejarah juga dermawan dalam menilai kepribadian yang tidak menyenangkan.

Berdasarkan pemaparan beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa fungsi sejarah tidak hanya sebagai pemuas rasa ingin tahu semata. Melainkan memberikan pendidikan, kebenaran, saksi waktu, guru kehidupan, presentasi komperhensif karakter yang hidup dalam suatu masa. Semua ini menawarkan bekal pengalaman yang tidak ada habisnya terhadap apa yang mereka mungkin dapatkan. Secara sistematis, Notosutanto (dalam Supardan, 2015:309) mengidentifikasi empat fungsi sejarah yakni fungsi rekreatif, instruktif, inspiratif, dan edukatif. Namun, dalam penelitian ini pengklasifikasian fungsi sejarah lebih dikategorikan sesuai dengan data dalam novel. Dalam hal ini, fungsi arah sejarah tersebut antara lain: 1) fungsi edukatif, dan 2) fungsi inspiratif.

2.5.1 Fungsi Edukatif

Kartodirdjo (1993:242) mengungkapkan bahwa penulisan sejarah dari segi mendidik atau edukatif pada dasarnya sangat intrumental untuk meneruskan tradisi, kebijakan, pengetahuan, nilai-nilai dari generasi ke generasi. Fungsi edukatif pada teks sastra terkait sejarah berperan penting dalam memberikan hal positif dalam menjalani kehidupan. Melalui fungsi edukatif dapat dijadikan motivasi bagi seseorang memecahkan masalah masa kini, serta merealisasikan harapan masa mendatang yang lebih baik. Sebab melalui masa kinianlah sejarah memiliki arti dan bukan sejarah yang mati.

Melalui belajar sejarah dari fungsi edukatif maka akan memberikan gambaran terhadap pelajaran yang dapat diambil dari berbagai realitas masa silam.

Keberhasilan masa lampau akan memberikan pengalaman pada seseorang di masa sekarang, bahwa hal-hal yang baik perlu disambut dan diusahakan betul supaya terjadi lagi. Namun sebaliknya, bahwa kesalahan atau kegagalan masyarakat di masa lalu dijadikan pembelajaran agar dihindari karena merupakan suatu hal negatif atau tidak baik dan dicoba untuk menghilangkan atau menghindarinya (Sugeng, 2016).

Secara khusus, fungsi edukatif (pendidikan) menurut Maksun (2016:69) merupakan makna dari sejarah masa lampau yang penuh arti, bahwa melalui sejarah dapat memungut nilai-nilai berupa konsep-konsep. Konsep tersebut nantinya bermanfaat guna edukatif dari sejarah dalam memetik hikmah dan mengambil wawasan di masa kini dan masa akan datang. Representasi tersebut juga dibangun dengan pemahaman yang cepat mengenai suatu hal secara universal yang telah dikenal dan diterima, dengan cara baru, unik dan tidak terduga.

a. Konsep

Konsep berorientasi pada abstraksi berupa denotatif maupun konotatif. Konsep ini merupakan alat yang mengandung karakteristik-karakteristik yang umum untuk dianalisis. Konsep berperan dalam memaparkan bagaimana suatu hal yang sulit membutuhkan keterangan yang cukup jelas. Dalam hal ini, bermanfaat sebagai pemecah masalah terhadap hal yang dianggap rumit. Melalui penempatan ide, peristiwa, individu ataupun objek kepada kategori yang tepat maka akan mendapatkan suatu wawasan dari konsep dengan keterangannya (Fraenkel dalam Supardan, 2015:55).

Terdapat beberapa klasifikasi mengenai konsep diantaranya sebagai berikut. Pertama konsep konjungtif, yakni penghubungan dua atribut atau lebih yang harus ada. Kedua disjungtif, yakni konsep yang memberikan berbagai pilihan dari berbagai hal. Ketiga relasional, yakni konsep yang menunjukkan hubungan khusus melalui bilangan tertentu. Keempat deskriptif, yakni konsep yang memberikan gambaran karakteristik suatu hal.

Kelima valuatif, yakni konsep yang mempertimbangkan baik buruknya suatu hal, dan terakhir konsep campuran yakni perpaduan antara deskriptif dan valuatif. Konsep campuran merupakan suatu konsep yang lebih lengkap dalam menjelaskan mengenai suatu gambaran suatu hal dengan karakteristik maupun ciri-ciri esensial yang sama. Selain itu, konsep campuran juga mempertimbangkan baik buruknya. Konsep paling banyak ditemui dalam hal ini seperti pembunuhan sadis, pemerintah otoriter, kolonialisme, imperialisme, sadisme dan sebagainya (Supardan, 2015:54).

b. Kebijaksanaan

Selain adanya nilai berupa konsep, fungsi edukatif dalam sejarah juga mengajarkan kebijaksanaan. Seperti Jhon Seeley (dalam Supardan, 2015:309) mengungkapkan bahwa pertautan masa silam dengan sekarang bahwa dengan belajar sejarah maka akan lebih bijaksana dalam setiap kejadian. Sejarah dapat memberikan kebijaksanaan terhadap pembaca karena dengan mempelajari sejarah dapat memetik hikmah dari berbagai hal masa lalu. Dalam hal ini, guna memperoleh nilai sebanyak-banyaknya dalam menjalani kehidupan.

Kebijaksanaan merupakan kepandaian dan kecermatan menggunakan akal budinya dalam bertindak ketika menghadapi suatu masalah. Secara khusus bahwa

dalam suatu kebijaksanaan, pengetahuan merupakan sesuatu yang relevan dalam keputusan-keputusan mengenai kebijaksanaan. Hal itu, dikarenakan apabila kekurangan pengetahuan maka asumsi kebijaksanaan menjadi tidak tepat baginya akan saling bersambung. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan begitu penting dalam sebuah kebijaksanaan seseorang (Ufford, 1989:156).

Pemikiran tersebut didukung oleh pendapat Russel (1992:90) yang mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan jika tidak digunakan secara bijaksana, maka akan menjadi sesuatu hal yang kurang baik, misalkan penipuan, kejahatan maupun hal-hal negatif lainnya. Namun, jika ilmu pengetahuan digunakan secara bijaksana akan memberikan dua manfaat yakni dapat mengurangi hal-hal buruk dan meningkatkan hal-hal yang baik. Pengetahuan inilah merupakan suatu hal paling baik sebagai landasan kebijaksanaan.

Sementara itu, dalam rangkaian perkembangan politik mutakhir, kebijaksanaan baku dalam ilmu politik bahwa kekuasaan tidak akan bertahan lama tanpa kebenaran dan kebenaran tidak akan terlaksana tanpa adanya kekuasaan. Kekuasaan yang ampuh hanya dicapai jika hal tersebut sekaligus menyantuni kebenaran, sejalan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Guna memadukan kebenaran dan kekuasaan mutlak diperlukan praktik yang konkret saling menghormati antara negara dan masyarakat. Pada masyarakat luas bisa saja memiliki aspirasi kebenaran yang kuat, namun jika penguasa tidak mampu menerjemahkan aspirasi tersebut maka yang terjadi adalah *chaos* atau kekacauan (Haryanto dalam Sukandi, 1999:32).

Fungsi edukatif sejarah merupakan suatu hal bagaimana sejarah memberikan suatu konsep wawasan pengetahuan yang berguna untuk mengetahui

peristiwa atau realitas pada masa silam. Fungsi edukatif selain itu, mengajarkan kebijaksanaan dalam memberikan manfaat untuk mengurangi hal-hal buruk dan meningkatkan hal-hal yang baik. Sementara itu, kebijaksanaan dalam politik memberikan pelajaran bahwa dalam sebuah kekuasaan yang baik perlu adanya kombinasi antara kekuasaan dengan kebenaran melalui praktik yang konkret saling menghormati antara negara dan masyarakat.

2.5.2 Fungsi Inspiratif

Fungsi inspiratif dalam sejarah merupakan hal bagaimana sejarah dapat menginspirasi untuk memperkuat perasaan akan realitas, seperti harapan-harapan datangnya zaman keemasan di masa depan. Menurut Supardan (2015:309) bahwa fungsi inspiratif dalam sejarah dapat memberikan sebuah ilham atau inspirasi. Pada contoh perjuangan para pejuang masa silam, akan membuat pembaca terinspirasi untuk melakukan hal serupa atau bahkan lebih dari sebelumnya.

Kartodirdjo (1993:21) menambahkan bahwa sejarah memberikan inspirasi terhadap generasi mudanya melalui perjuangan tokoh pada masa silam. Hal tersebut penting diwujudkan kembali sebagai suri tauladan seperti sikap pengorbanan, dedikasi yang tinggi, bertanggung jawab, mengutamakan hal umum, dan tidak kenal lelah dalam meraih berprestasi. Karakteristik yang dimiliki tokoh atau pahlawan dalam sejarah yang dikaji perlu diungkapkan untuk membangkitkan inspirasi serta memacu motivasi yang kuat kepada generasi muda agar mengembangkan aktivitasnya dalam pengabdian di masyarakat.

Dalam hal ini, untuk memunculkan inspirasi dibutuhkan rangsangan dari luar yang setiap orang memiliki perbedaan kepekaan dan kepentingan atas

rangsangan tersebut. Menurut Hok Gie (2005:102) fungsi sejarah dalam sebuah negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia adalah sebagai sumber inspiratif yakni sebagai kekuatan mental. Pentingnya sebuah sejarah juga disadari adanya setiap tokoh, peristiwa dan sebagainya yang dapat menimbulkan inspirasi perjuangan bagi bangsa Indonesia.

a. Mental

Kekuatan mental sendiri merupakan suatu kekuatan yang hadir dalam diri seseorang yang tidak terlihat secara fisik. Mental dapat dibedakan pada dua hal penting. Dalam hal ini adanya sikap mental yang bersumber pada nilai budaya dan sikap mental yang timbul sejak zaman revolusi (Koetjaningrat, 1994:37).

Mentalitas bersumber pada sistem nilai budaya, ini terdapat masyarakat kota dan desa yang memiliki perbedaan. Masyarakat desa dalam hubungannya adanya menilai tinggi, konsep sama rata sama rasa. Mereka menjunjung tinggi dalam usaha tidak menonjol dari yang lain. Sementara itu, masyarakat kota menilai tinggi pekerjaan dalam usaha meraih kemakmuran seperti kedudukan atau kekuasaan. Konsepsi mengenai sikap mental yang bersumber dari nilai dapat dilihat pada sifat mentalitas dari semua suku bangsa yang ada. Dalam hal ini, mempunyai aspek positif guna pembangunan (Koetjaningrat, 1994:70).

Sementara itu, sikap mental yang muncul sejak zaman revolusi menurut Koetjaningrat (1994:68) yakni sikap mental yang diperlukan untuk mempertinggi kapasitas membangun. Dalam hal ini, berupa nilai-nilai yang berorientasi terhadap *achievement* atau meraih sesuatu, nilai yang mementingkan eksplorasi (sebuah penemuan-penemuan). Selain itu, memiliki sifat hemat dalam memperhitungkan masa depan dan memiliki jiwa bersaing yang tinggi.

b. Nasionalisme

Selain adanya kekuatan mental dalam fungsi inspiratif. Menurut Maksun (2016:70) fungsi inspiratif sejarah berkaitan dengan semangat nasionalisme atau patriotisme, terutama berfungsi bagi usaha menumbuhkan harga diri bangsa. Nasionalisme dalam fungsi sejarah sendiri merupakan suatu fungsi dalam memberikan semangat nasionalisme bagi pembaca yang mengambil sikap dari berbagai tokoh masa silam dalam mencintai negrinya.

Adapun sikap nasionalisme menurut Levy (dalam Kartodirdjo, 1993:245) bahwa setidaknya terdapat tiga hal penting sebagai tindakan kelompok nasionalis yang dapat dibedakan sebagai berikut. a) Kognitif yakni aspek yang berkaitan dengan adanya pengertian atau pengetahuan terkait situasi atau kondisi suatu negara menguasai rakyat dengan segala proporsinya. b) Aspek orientasi yakni tujuan yang berkaitan dengan suatu adanya keadaan yang berharga dalam tujuan hidup yang terbebas dari negara yang menguasai rakyat. c) Aspek afektif yakni sebagai suatu hal yang berkaitan adanya tindakan atau sikap terhadap situasi yang menyusahkan atau menyenangkan. Dalam hal ini segala bentuk diskriminasi negara yang menguasai rakyat akan melahirkan aspek afektif ini.

Fungsi inspiratif dalam sejarah memberikan inspirasi terkait keberadaan adanya aspek penguatan mental dan semangat nasionalisme yang dihadirkan tokoh pada masa silam. Kekuatan mental berisi nilai yang berorientasi terhadap budaya dan yang timbul sejak zaman revolusi. Sementara itu, nasionalisme berisikan inspirasi tindakan tokoh masa silam dalam menanamkan nilai-nilai segenap bangsa Indonesia guna mempertahankan kesatuan yang berupa aspek kognitif, orientasi, dan afektif.